

ANALISIS EKONOMI LINGKUNGAN DAN KEBERLANJUTAN TERHADAP DISKURSUS OPINI PUBLIK DENGAN METODE NETNOGRAFI PADA ISU DEFORESTASI DARI POSTINGAN INSTAGRAM @BLOOMBERGTECHNO

PUTRI SARAH OLIVIA, S.E., M.M. ,DWI WINARNO, S.E., MBA. ,MUTIARA WIDYA PERTIWI

Email : putri.sarah@cakrawala, dwiwin@cakrawala.ac.id, mutiara.pertiwi@cakrawala.ac.id

Universitas Cakrawala

Jurusan: Keuangan dan Investasi

abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis opini publik terhadap kebijakan deforestasi yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui platform media sosial Instagram, khususnya pada akun @bloombergtechnoz. Pendekatan yang digunakan adalah metode netnografi sebagai adaptasi etnografi dalam ruang digital, dan dianalisis menggunakan perspektif ekonomi lingkungan dan keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini publik terbagi dalam dua faktor utama, yaitu governance (tata kelola) sebesar 47% dan sustainability (keberlanjutan) sebesar 53%. Kritik publik mencerminkan kekhawatiran terhadap hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan emisi karbon, degradasi ekosistem, serta ketidakpercayaan terhadap tata kelola dan motif politik pemerintah. Temuan ini menegaskan pentingnya tata kelola yang transparan dan kebijakan berbasis ekologi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta perlunya integrasi antara tujuan ekonomi dan konservasi lingkungan.

Kata Kunci: Deforestasi, Netnografi, Ekonomi Lingkungan, Keberlanjutan, Opini Publik, Media Sosial

Abstract

This study aims to analyze public opinion regarding Indonesia's deforestation policy as reflected on the social media platform Instagram, particularly through the account @bloombergtechnoz. The research applies a netnographic approach—an adaptation of ethnography in digital contexts—and is analyzed through the lens of environmental economics and sustainability. Findings indicate that public opinion is dominated by two main factors: governance (47%) and

Article history

Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

MUSYTARI

sustainability (53%). Public criticism reflects concerns over biodiversity loss, increased carbon emissions, ecosystem degradation, and distrust in government governance and political motives. The results emphasize the need for transparent environmental governance and ecologically grounded policy-making to support sustainable development. It also underlines the importance of integrating economic goals with environmental conservation.

Keywords: Deforestation, Netnography, Environmental Economics, Sustainability, Public Opinion, Social Media

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Ekonomi Lingkungan	5
2.2 Opini Publik	6
2.3 Netnografi.....	7
2.4 Deforestasi.....	7
2.5 Penelitian Terdahulu	8
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN	16
3.1 Analisis Netnografi	16
3.2 Analisis Ekonomi Lingkungan.....	21
BAB IV KESIMPULAN	26
4.1 Kesimpulan.....	26
4.2 Saran	27
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Penelitian Etnografi Terdahulu	8
Tabel 2. Penelitian Deforestasi Terdahulu	10
Tabel 3. Analisis Netnografi Opini Publik	16

BAB 1 **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan hutan yang sangat penting, baik bagi lingkungan global maupun masyarakat Indonesia sendiri. Sayangnya, data dari *Global Forest Watch* (GFW) (2024) menunjukkan bahwa Indonesia telah kehilangan tutupan pohon secara signifikan. Sejak tahun 2001 hingga 2023, Indonesia telah kehilangan 30,8 juta hektar tutupan pohon. Angka ini setara dengan 19% dari total tutupan pohon di tahun 2000, dan menghasilkan emisi CO₂e sebesar 22,2 gigaton. Kehilangan ini sebagian besar disebabkan oleh deforestasi, terutama yang didorong oleh ekspansi komoditas. Deforestasi merupakan salah satu permasalahan lingkungan global yang mengemuka dalam beberapa dekade terakhir, yang mengalihfungsikan lahan hutan ke non-hutan, terutama di kawasan tropis seperti Indonesia yang memiliki tutupan hutan yang signifikan. Namun, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan berencana mengalihkan 20 juta hektare hutan menjadi lahan untuk kegiatan pangan, energi, dan air guna mendukung program swasembada pangan. Kebijakan ini melibatkan koordinasi dengan Kementerian Pertanian serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang akan memanfaatkan lahan tersebut untuk berbagai proyek nasional. Kebijakan ini melibatkan konversi 1,1 juta hektare lahan hutan untuk penanaman padi gogo yang diproyeksikan dapat meningkatkan stok beras nasional hingga 3,5 juta ton per tahun. Selain itu, pohon aren akan ditanam secara berdampingan untuk menghasilkan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif (Bloombergtechnoz, 2025). Namun, rencana ini menimbulkan kontroversi, terutama terkait dampaknya terhadap keberlanjutan ekosistem hutan, emisi karbon, dan perubahan iklim global. Sehingga menimbulkan kritik keras lapisan masyarakat.

Kritik keras datang dari berbagai pihak, karena menilai kebijakan ini berisiko mengorbankan kelestarian lingkungan demi tujuan jangka pendek. Berbagai pihak juga mengkritik pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang meminta masyarakat tidak perlu takut terhadap dampak kebijakan ini, yang dinilai dapat disalahtafsirkan sebagai pengabaian

MUSYTARI

terhadap risiko ekologi. Sementara itu, aktivis lingkungan memperingatkan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan upaya mitigasi perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati (Tempo, 2025). Selain itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendukung perluasan perkebunan kelapa sawit meski harus melalui deforestasi menambah polemik. Prabowo mengklaim bahwa kelapa sawit adalah pohon yang dapat menyerap karbon dioksida, namun kritik dari aktivis lingkungan, seperti *Greenpeace*, menyoroti bahwa kemampuan perkebunan sawit dalam menyerap karbon jauh lebih rendah dibandingkan hutan alam. Hilangnya tutupan hutan tidak hanya mengurangi kapasitas penyerapan karbon, tetapi juga mengancam keanekaragaman hayati dan siklus ekosistem secara keseluruhan (VoA Indonesia, 2025).

Fenomena ini menjadi perhatian serius mengingat hutan tropis Indonesia memainkan peran krusial sebagai penyerap karbon global. Curtis *et al.* (2018) mencatat bahwa deforestasi tropis menyumbang sekitar 17% dari emisi karbon global. Hilangnya tutupan hutan tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem tetapi juga memperburuk dampak perubahan iklim, seperti peningkatan frekuensi bencana alam dan kehilangan keanekaragaman hayati (Arshad *et al.*, 2020). Dalam hal ini, deforestasi sebagai dampak dari kebijakan alih fungsi lahan memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan dan legislator nasional, yang menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim (Tempo, 2025; Kompas, 2025). Diskursus publik yang termanifestasi dalam bentuk opini publik warganet di *platform online* media sosial, khususnya dalam komentar Instagram, menunjukkan tendensi penolakan yang signifikan terhadap rencana deforestasi tersebut oleh masyarakat Indonesia.

Dalam era digital, opini publik terkait kebijakan deforestasi semakin terekspos melalui media sosial. Netnografi, sebagai adaptasi etnografi dalam konteks digital, memungkinkan analisis mendalam terhadap sentimen

dan persepsi masyarakat terhadap isu-isu kritis seperti ini. Penelitian dengan metode netnografi efektif dalam mengeksplorasi opini publik terhadap fenomena sosial dan kebijakan publik dalam dunia virtual (Kozinets, 2010; Hine, 2000). Metode netnografi merupakan metodologi kualitatif yang masih baru, sehingga masih sedikitnya penelitian dengan metode tersebut. Berbeda dengan metode kualitatif lainnya maupun kuantitatif. Penelitian mengenai deforestasi juga banyak dilakukan. Namun, penelitian terkait opini publik terhadap kebijakan deforestasi dengan metode netnografi di *platform* media sosial masih terbatas, terutama di akun Instagram. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis opini publik terhadap deforestasi oleh pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan netnografi pada postingan Instagram @bloombergtechnoz yang dikaji secara teoretis dalam teori ekonomi lingkungan sebagai dasar analisis. Ekonomi lingkungan berfokus pada hubungan timbal balik antara aktivitas ekonomi dan lingkungan, dengan tujuan mencapai kesejahteraan manusia yang berkelanjutan (Nono, 2024). Sementara itu, netnografi menyediakan alat untuk memahami dinamika diskursus daring dan persepsi publik dalam ekosistem digital. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kompleksitas opini publik di media sosial terhadap kebijakan deforestasi di era digital untuk memahami faktor penolakan dan bagaimana analisisnya dalam keilmuan ekonomi lingkungan dan keberlanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana opini publik terhadap kebijakan deforestasi di akun Instagram @bloombergtechnoz
- b. Apa saja faktor penolakan dari opini publik terhadap kebijakan deforestasi di akun Instagram @bloombergtechnoz

MUSYTARI

- c. Bagaimana ekonomi lingkungan dan keberlanjutan menjelaskan fenomena dari opini publik terhadap kebijakan deforestasi di akun Instagram @bloombergtechnoz

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana opini publik terhadap kebijakan deforestasi di akun Instagram @bloombergtechnoz
- b. Apa saja faktor penolakan dari dari opini publik terhadap kebijakan deforestasi di akun Instagram @bloombergtechnoz
- c. Bagaimana ekonomi lingkungan dan keberlanjutan menjelaskan fenomena dari opini publik terhadap kebijakan deforestasi di akun Instagram @bloombergtechnoz

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara keilmuan, penelitian ini memperluas penerapan teori ekonomi lingkungan dengan memberikan wawasan baru mengenai interaksi antara kebijakan deforestasi, persepsi publik, dan keberlanjutan lingkungan di era digital. Studi ini juga berkontribusi pada pengembangan metode netnografi sebagai alat analisis dalam kajian opini publik terkait isu-isu lingkungan, yang masih jarang diterapkan secara mendalam dalam kajian kebijakan lingkungan di Indonesia.
- b. Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan untuk memahami respons publik terhadap kebijakan deforestasi. Hasil penelitian dapat digunakan untuk merumuskan strategi komunikasi yang lebih tepat dalam menyampaikan kebijakan lingkungan, serta mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis data, guna meminimalkan konflik antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekonomi Lingkungan

Ekonomi Lingkungan adalah cabang ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara aktivitas ekonomi dan kondisi lingkungan, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia yang berkelanjutan (Fauzi, 2006; Nono, 2024). Jika kelestarian lingkungan tidak dijaga dengan baik, maka biaya yang timbul untuk memulihkan sumber daya yang hilang atau rusak akibat degradasi lingkungan akan sangat tinggi. Oleh karena itu, ekonomi lingkungan berperan penting dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keberlanjutan ekosistem hidup. Menurut Danhas & Muchtar (2021), terdapat lima korelasi utama antara manusia dan lingkungan yang saling terkait, yaitu: pertama, manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan melalui elemen-elemen kehidupan yang ada di dalamnya, seperti makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, hewan, serta benda mati seperti air, udara, dan tanah; kedua, manusia memerlukan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; ketiga, kebutuhan manusia yang terus berkembang seringkali berhadapan dengan keterbatasan sumber daya yang ada; keempat, keterbatasan sumber daya tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, namun juga akibat perilaku manusia itu sendiri; dan kelima, perubahan ekosistem yang disebabkan oleh aktivitas manusia dapat menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi lingkungan dalam jangka panjang diyakini dapat memberikan keuntungan ekonomi yang substansial, seperti penghematan biaya terkait kerusakan lingkungan, peningkatan daya saing, serta potensi keuntungan finansial yang diperoleh melalui inovasi dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Armayani *et al.*, (2022) mengungkapkan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Meskipun dampak positif dari aktivitas ekonomi langsung

terlihat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang meningkat, dampak negatif—seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan—seringkali muncul sebagai konsekuensi dari meningkatnya intensitas produksi dan konsumsi. Pencemaran yang timbul dapat merusak kualitas hayati manusia, yang pada gilirannya menghambat kelangsungan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya penting untuk mengurangi emisi, tetapi juga untuk memastikan tercapainya keefisiensi dalam memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kesejahteraan generasi yang akan datang.

2.3 Opini Publik

Opini publik merupakan respon atas fenomena sosial yang kompleks dan dinamis yang terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antar individu dalam suatu masyarakat, yang merefleksikan agregasi sikap, keyakinan, dan penilaian terhadap isu-isu yang dianggap relevan dan penting (Crespi, 1997). Opini publik bukanlah entitas statis, melainkan suatu konstruksi sosial yang terus berkembang dan bertransformasi seiring dengan dinamika sosial, politik, dan budaya (Glynn *et al.*, 1999). Menurut Blumer (1948), opini publik menempati posisi penting sebagai cerminan kehendak rakyat, yakni bahwa opini publik bertindak sebagai mekanisme kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun, perlu diperhatikan bahwa opini publik tidak selalu rasional dan objektif. Lippmann (1922) mengungkapkan bahwa opini publik seringkali dibentuk oleh persepsi dan stereotip yang dikonstruksi oleh media massa.

Opini publik dipandang sebagai produk dari proses komunikasi yang melibatkan berbagai aktor, seperti individu, kelompok, media massa, dan institusi politik (McQuail, 2010). Proses pembentukan opini publik dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari karakteristik individu, seperti latar belakang sosial, pendidikan, dan pengalaman hidup, hingga faktor eksternal, seperti paparan informasi, pengaruh kelompok, dan narasi media (Noelle-Neumann, 1984, Price, 1992). Di era digital, peran media sosial semakin menonjol dalam memfasilitasi diskusi publik, mobilisasi

opini, dan partisipasi politik (Bennett & Segerberg, 2012). Namun, keberadaan media sosial juga menimbulkan tantangan baru, seperti penyebaran disinformasi, polarisasi opini, dan fragmentasi publik (Sunstein, 2009).

2.4 Netnografi

Netnografi adalah metode penelitian kualitatif yang relatif baru yang merupakan adaptasi dari etnografi tradisional ke dalam ranah digital, dengan memindahkan fokus penelitian dari interaksi tatap muka di lapangan fisik ke *platform online* dan *platform digital* lainnya (Kozinets, 2010). Pendekatan observasi partisipan dan interpretasi mendalam terhadap interaksi *online*, wawancara virtual, dan teks digital melalui komentar, netnografi bertujuan untuk memahami makna, nilai, dan praktik yang berkembang di *platform online* (Hine, 2000; Markham, 2005).

2.5 Deforestasi

Deforestasi didefinisikan sebagai konversi hutan menjadi lahan non-hutan (Curtis *et al.*, 2018), menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Hilangnya tutupan hutan mengakibatkan dampak negatif pada keanekaragaman hayati, kualitas tanah, dan siklus air (Dalla-Nora *et al.*, 2014). Selain itu, deforestasi juga memperparah perubahan iklim global karena hutan berperan penting dalam menyerap dan menyimpan karbon (Arshad *et al.*, 2020).

Beberapa faktor pendorong deforestasi meliputi ekspansi pertanian, pembalakan liar, industri energi, dan kebakaran hutan. Di Indonesia, konversi hutan menjadi lahan perkebunan, terutama kelapa sawit, menjadi penyebab utama deforestasi (Mutolib *et al.*, 2017). Di tingkat global, penelitian menunjukkan bahwa deforestasi paling banyak terjadi di daerah tropis, terutama di Amerika Latin dan Asia Tenggara (Seydewitz *et al.*, 2023). Deforestasi merupakan isu lingkungan yang semakin mengkhawatirkan di seluruh dunia. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memahami penyebab, dampak, dan solusi untuk mengatasi permasalahan ini.

Dampak deforestasi sangat merugikan bagi lingkungan dan manusia. Hilangnya hutan mengancam kehidupan berbagai spesies, menyebabkan erosi tanah, dan mengganggu siklus air (Pasai, 2020). Selain itu, deforestasi juga memperburuk perubahan iklim karena hutan berperan sebagai penyerap karbon (Rahman & Zahra, 2021). Sehingga diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk mengatasi deforestasi dan melindungi hutan yang tersisa. Penelitian tentang deforestasi terus berkembang dengan berbagai pendekatan dan metode. Beberapa penelitian menggunakan teknologi penginderaan jauh untuk memantau perubahan tutupan hutan (Margono *et al.*, 2014). Pendekatan lain melibatkan studi lapangan, wawancara, dan analisis data sekunder untuk memahami faktor-faktor pendorong deforestasi (Mutolib *et al.*, 2017). Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami kompleksitas deforestasi dan merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan, terutama dengan metode netnografi.

2.6 Penelitian Terdahulu

2.6.1 Penelitian Netnografi

Tabel 1. Penelitian Etnografi Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Jurnal	Metode	Hasil Penelitian
1	Sulistiyowati, R. A. (2024). Studi Netnografi Respon Warganet mengenai Toxic Relationship pada Video Youtube Penyintas #BukanSayang Namanya. Jurnal Interaksi, 8(2), 355-373.	Netnografi	Komentar netizen beragam, mulai dari empati, berbagi pengalaman serupa, hingga menyalahkan korban dan pelaku.
2	Fadhli, A., Yulianita, N., & Chaerowati, D. L. (2024). Netnografi Budaya Digital Dari Media Sosial Manual Brew Community. PIKMA, 7(1), 86-104.	Netnografi	Aktivitas digital didesain bukan untuk mengembangkan komunitas melainkan berkonsentrasi pada penyelenggaraan kompetisi. Tidak memiliki karakteristik komunikasi digital yang spesifik.
3	Nurhaliza, W. O. S. (2024). Studi Netnografi Penggunaan Media Sosial Untuk Bisnis	Netnografi	Instagram yang diteliti memaksimalkan penggunaan fitur Instagram untuk promosi,

MUSYTARI

	Pada Akun Instagram @Jilbrave.Official. Jurnal Ilmu Komunikasi UHO, 9(2), 350-363.		menerapkan pola komunikasi dua arah, dan membangun komunitas virtual.
4	Sabrina, G. R., & Vera, N. (2023). Komentar Positif Netizen Terhadap Film 'Like & Share' (Studi Netnografi Akun Instagram @Filmlikeandsahre). Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 7008-7018.	Netnografi	Akun Instagram yang diteliti memiliki banyak konten terkait film "Like & Share" dan mendapat banyak komentar positif serta dukungan dari netizen.
5	Sahid, H. H. (2023). Opini Publik Tragedi Kanjuruhan: Studi Netnografi pada Kolom Komentar Video Youtube Tragedi Kanjuruhan. Jurnal Ilmu Komunikasi UHO, 8(2), 140-158.	Netnografi	Terdapat delapan kategori komentar yang membentuk opini publik terkait Tragedi Kanjuruhan, mulai dari simpati, ucapan terima kasih, hingga kemarahan dan harapan keadilan.
6	Muntu, S. A. J., Tangkudung, J. P. M., & Lotulung, L. J. H. (2021). Studi Netnografi Pada Media Sosial Instagram. Acta Diurna Komunikasi, 3(4).	Netnografi	Akun Instagram yang diteliti berisi beragam berita dari dalam dan luar negeri yang dikemas dengan memperhatikan unsur-unsur komunikasi visual.
7	Rinaldi, A. R., Mutiarin, D., & Damanik, J. (2021). Analisis Netnografi Sentimen Pengguna Twitter Terhadap Pembukaan Kembali Pariwisata di Tengah Pandemi Covid-19. Pariwisata Budaya, 28-36.	Netnografi	Sebagian besar pengguna Twitter menunjukkan sentimen netral terhadap pembukaan kembali pariwisata di tengah pandemi Covid-19.
8	Sumarno, Utari, P., & Rahmanto, A. (2021). Studi Netnografi Post-Truth Dalam Percakapan Politik Pemilihan Presiden 2019 Di Facebook. Jurnal PIKOM, 22(2), 161-176.	Netnografi	Facebook menjadi media efektif untuk menyebarkan konten post-truth berupa hoax dan fakenews selama Pilpres 2019.
9	Yenny, & Astuti, S. W. (2019). Body Shaming di Dunia Maya: Studi Netnografi pada Akun Youtube Rahmawati Kekeyi	Netnografi	Masih banyak netizen yang melakukan body shaming dengan berbagai jenis komentar negatif.

	Putri Cantika. PROMEDIA, 5(1), 166-188.		
10	Purwanto, E., & Ihalauw, J. J. O. (2017). Bisikan Dari Balik Layar: Netnografi Strategi Bisnis Berorientasi Pasar. <i>Journal of Business & Applied Management</i> , 9(2), 220-233.	Netnografi	Restoran X perlu mengembangkan strategi berorientasi pasar pada dimensi customer orientation, competitor orientation, inter-functional coordination, dan fokus jangka panjang.

Research gap dari penelitian terdahulu meskipun sama-sama menggunakan metode netnografi, namun yang menjadi pembeda adalah (1) tidak ada penelitian dalam kumpulan artikel pada jurnal diatas yang secara khusus membahas deforestasi. Penelitian yang ada lebih fokus pada isu sosial, budaya digital, dan komunikasi di media sosial.; (2) Tidak ada penelitian dalam kumpulan artikel dari jurnal diatas yang secara khusus membahas akun Instagram @bloombergtechnoz. Penelitian yang ada lebih fokus pada akun-akun dengan konten umum atau memiliki popularitas tinggi, seperti akun berita, akun bisnis, atau akun publik figur. Meskipun @bloombergtechnoz adalah akun berita, namun belum ada yang membahasnya.

2.6.2 Penelitian Deforestasi

Tabel 2. Penelitian Deforestasi Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Jurnal	Metode	Hasil Penelitian
1	Ansar, S. S. A., Rahmawati, A., & Arrahman, R. D. (2024). Peninjauan Bencana Alam akibat Deforestasi Hutan dan Tantangan Penegakkan Hukum mengenai Kebijakan Penebangan Hutan Berskala Besar di Indonesia. <i>Indonesian Journal of Law and Justice</i> , 1(4), 1-11.	Analisis deskriptif dan studi literatur.	Deforestasi hutan dapat meningkatkan risiko bencana alam dan dampak sosial-ekonomi negatif. Tantangan dalam kebijakan penebangan hutan berskala besar di Indonesia meliputi konflik kepentingan, kebijakan dan tata kelola yang lemah, pemukiman ilegal, pengaruh politik, dan

MUSYTARI

			rendahnya kesadaran lingkungan.
2	Anshari, M., & Permata, C. (2024). Deforestasi Hutan Lindung dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate Perspektif Maqashid Syariah. <i>Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan</i> , 18(3), 2031-2047.	<i>Philosophical approach, conceptual approach, dan statute approach.</i>	Dampak dari deforestasi hutan lindung di Kalimantan Tengah adalah terjadinya banjir besar di Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pelepasan 250 ribu ton emisi karbon ke permukaan bumi. Deforestasi hutan lindung pada proyek strategis nasional <i>food estate</i> tidak selaras dengan <i>maqashid syariah</i> .
3	Mukti, A. (2024). Analisis deforestasi dan perubahan tutupan lahan di Kabupaten Bogor: implikasi bagi konservasi hutan dan pengelolaan sumber daya alam. <i>Peatland Agriculture and Climate Change Journal</i> , 1(1), 24-34.	Pemetaan tutupan lahan menggunakan citra satelit	Deforestasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terutama terjadi di areal penggunaan lain, dengan alih fungsi hutan menjadi pertanian lahan kering campur semak sebagai penyebab utama. Deforestasi juga terjadi di kawasan lindung.
4	Solehuwey, E., Mardiatmoko, G., & Boreel, A. (2024). Analisis Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. <i>Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil</i> , 8(1), 37-50.	Citra satelit Landsat 8 OLI dan regresi logistik.	Laju degradasi hutan di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2013-2020 adalah: hutan lahan kering primer 0,14%, hutan lahan kering sekunder 2,24%. Laju deforestasi pada tutupan lahan hutan

MUSYTARI

			tahun 2013 yang berubah menjadi non-hutan di tahun 2020 sebesar -0,25%.
5	Gamatar, M. P. J., & Kusumawardani, D. (2024). Pengaruh Deforestasi Terhadap Emisi CO2 Pada Negara Beriklim Tropis Di Benua Asia. <i>Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)</i> , 8(2), 1239-1256.	Metode DOLS dan FMOLS.	Peningkatan 1% deforestasi akan meningkatkan emisi CO2 sebesar 0.026105%. Pendapatan dan konsumsi energi memiliki pengaruh terhadap peningkatan emisi CO2, dan terdapat Environmental Kuznets Curve (EKC) berbentuk U terbalik.
6	Dewi, R. U. I., Zuhaiery, A., Sa'diyah, N. H., Rizqiya, T. F., & Nurpratiwi, H. (2023). Harmonisasi Masyarakat Dan Pemerintah Untuk Mengatasi Deforestasi Di Selatan Tulungagung. <i>Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora</i> , 2(2), 149-157.	Deskriptif dan studi literatur.	Pada tahun 2013-2014 jumlah deforestasi di Indonesia berada di angka 397,370 ha, tahun 2014-2015 berada pada angka 1,092,181 ha, kemudian tahun 2016-2020 luas deforestasi Indonesia berkurang drastis hingga mencapai angka 111,459.
7	Berlianty, T., & Meiliana, T. (2023). Potensi Deforestasi di Pulau Kalimantan: Pro dan Kontra Migrasi. <i>Jurnal Pemerintahan dan Politik</i> , 5(2), 279-290.	Studi pustaka.	su pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur melahirkan banyaknya migran yang datang ke pulau Kalimantan dan menuai pro dan kontra.
8	Ramadhany, N. (2023). Laju Deforestasi Hutan Akibat Aktivitas Pertambangan di Provinsi	DPSIR (Driving Forces, State, Impact,	Kegiatan pertambangan memberikan

	Kalimantan Timur. <i>Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan</i> , 7(1), 10-19.	Response dan studi literatur.	kontribusi yang signifikan dalam peningkatan laju deforestasi hutan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur.
9	Hutabarat, G. F. I. (2022). Kajian Green Politic Theory dalam Upaya Menangani Deforestasi Papua Terkait Aktivitas Ekspansi. <i>Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta</i> , 7(2), 59-76.	Deskriptif analitis dan studi kepustakaan.	Problematika utama dalam dinamika kepemilikan sawit di hutan adalah perizinan dan tata ruang.
10	Ningrum, D. A., Desfandi, M., & Ruliani, R. (2022). Identifikasi Perubahan Lahan Hutan Menjadi Lahan Pertanian di Desa Paya Dedep Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah. <i>Jurnal Pendidikan Geosfer</i> , 7(2), 168-179.	Sistem Informasi Geografis (SIG).	Terjadi alih fungsi lahan hutan di Desa Paya Dedep, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah sebesar 106,33 Ha.
11	Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. <i>JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan</i> , 6(1), 148-162.	Studi kepustakaan.	ingkat deforestasi di Indonesia masih tinggi. Deforestasi merupakan permasalahan yang memerlukan strategi dalam pengurangannya, salah satunya dengan program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).
12	Ayu, K. P. (2021). Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah: Mekanisme Politik di Balik Kerusakan Ekologi. <i>Jurnal Sosiologi</i> , 4(2), 61-71.	Studi literatur.	Dampak negatif lingkungan seperti hilangnya tutupan hutan, pencemaran air, erosi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati dan emisi gas rumah kaca terjadi dalam area perluasan perkebunan sawit.
13	Handalani, R. T. (2019). Determinan	Analisis regresi data	Dari 15 variabel

MUSYTARI

	Deforestasi Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara Periode 2008-2015. <i>Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota</i> , 15(1), 1-19.	panel (pooled least squares).	yang diteliti, hanya 6 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia, antara lain: HDI, jumlah penduduk, rasio hutang pemerintah terhadap GDP, indeks persepsi korupsi, <i>voice and accountability</i> , dan luas area pertanian dan perkebunan.
14	Mutolib, A., Yonariza, & Rahmat, A. (2019). Faktor Penarik dan Pendorong Deforestasi Hutan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat. <i>Journal of Tropical Upland Resources</i> , 1(1), 161-170.	Observasi lapangan dan analisis data sekunder.	Faktor penarik deforestasi hutan di KPHP Dharmasraya meliputi sifat ekonomi dan institusi sumber daya hutan, serta mudahnya akses dan topografi hutan yang landai. Faktor pendorong masyarakat melakukan penebangan hutan meliputi kebutuhan ekonomi, pembukaan lahan untuk perkebunan, dan penebangan kayu (illegal logging).
15	Hadiyan, Y., Yuliah, Y., & Pambudi, H. (2017). Memahami dan Membangun Pendekatan Penyelesaian Deforestasi dan Degradasi Hutan di Region Sumatera dan Kalimantan. <i>Proceeding Biology Education Conference</i> , 14(1), 166-169.	Studi literature dan analisis deskriptif.	Penyebab deforestasi dan degradasi hutan di Sumatera dan Kalimantan meliputi konversi hutan alam, pembalakan liar, kebakaran hutan, lemahnya penegakan hukum, konflik tenurial, eksploitasi berlebihan,

MUSYTARI

			pengembangan infrastruktur, dan pengelolaan hutan yang buruk.
--	--	--	---

Research gap pada penelitian-penelitian terdahulu adalah (1) Belum ada yang menggunakan metode netnografi. Metode yang digunakan umumnya adalah kualitatif deskriptif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya dengan pendekatan seperti studi literatur, wawancara, observasi lapangan, dan analisis data sekunder.; (2) Penelitian- penelitian terdahulu dalam artikel dari jurnal diatas tersebut belum ada yang menganalisis opini publik dengan tinjauan ekonomi lingkungan. Penelitian-penelitian tersebut lebih fokus pada analisis faktor-faktor penyebab deforestasi, dampak deforestasi terhadap lingkungan dan sosial-ekonomi, serta upaya-upaya penanggulangan deforestasi.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Netnografi

Bagian ini mengelaborasi analisis mendalam terhadap opini publik yang diidentifikasi melalui berbagai komentar di postingan instagram @bloombergtechnoz terkait isu deforestasi untuk ketahanan pangan dan energi. Komentar-komentar di postingan tersebut merepresentasikan perspektif masyarakat Indonesia mengenai dampak lingkungan, kebijakan strategis, serta implementasi proyek yang melibatkan eksploitasi sumber daya hutan. Analisis dilakukan menggunakan netnografi pendekatan deskriptif untuk menginterpretasikan opini publik dari komentar warganet, dan kemudian dicari salah satu faktor terbesar atas opini tersebut. Tabel berikut memaparkan rangkuman opini publik berdasarkan proses identifikasi dari komentar, interpretasi, dan pengelompokan faktor.

Tabel 3. Analisis Netnografi Opini Publik

Komentar	Interpretasi	Faktor
<p><i>Sudah dipilih lokasi yg tepat dgn varietas yg mau ditanam? Pernah uji tanam? Demplot? Atau spt yg seblm2nya... Yg penting kayunya diambil dulu.</i></p> <p><i>Kalau dulu SD thn 70an sering diajari perbedaan intensifikasi pertanian dan ekstensifikasi pertanian... Knp proyek selalu ekstensifikasi ya... Ekstensifikasi apakah sama dgn menjarah hutan???</i></p>	<p>Prioritas deforestasi untuk kayu, bukan ketahanan pangan.</p>	<p><i>Sustainability</i></p>
<p><i>Ngeri banget kaaan</i></p>	<p>Ketakutan terhadap dampak deforestasi.</p>	<p><i>Sustainability</i></p>
<p><i>Get well soon Indonesia</i></p>	<p>Harapan agar kondisi lingkungan Indonesia membaik.</p>	<p><i>Sustainability</i></p>
<p><i>Udah sakit</i></p>	<p>Indonesia dianggap dalam</p>	<p><i>Sustainability</i></p>

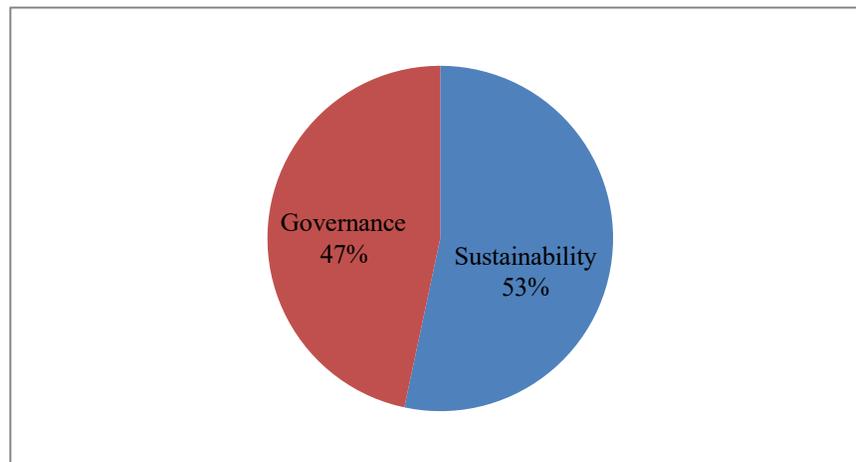
	kondisi kritis secara lingkungan.	
<i>Dipikir2 mata kuliah AMDAL cuma buat dpt cuan dr bayar UKT</i>	Kritik terhadap integritas pendidikan AMDAL.	<i>Governance</i>
<i>Ilmunya gak perlu diterapkan di wakanda</i>	Pendidikan AMDAL tidak dirasa relevan dengan realitas proyek.	<i>Governance</i>
<i>Proyek yg mengabaikan iklim</i>	Proyek tidak memperhatikan dampak perubahan iklim.	<i>Governance</i>
<i>Pusing² belajar AMDAL... Ealah...</i>	AMDAL dianggap tidak diterapkan secara benar.	<i>Governance</i>
<i>Global warming who? Yang penting cuan ckckck</i>	Keuntungan ekonomi dianggap lebih penting daripada perubahan iklim.	<i>Sustainability</i>
<i>Hutan di babat, suhu bumi makin naek. Emang bisa tumbuh sumber pangannya klu suhunya sudah semakin panas? Hmm ☐</i>	Kekhawatiran tentang dampak pemanasan global.	<i>Sustainability</i>
<i>Yg udah2 sih cuma dikeruk isinya dan ditinggal / asal tanam semoga mereka dikasi pencerahan untuk sadar tidak maruk</i>	Proyek hanya fokus eksploitasi tanpa keberlanjutan.	<i>Sustainability</i>
<i>Turut berdukacita</i>	Kesedihan atas dampak buruk deforestasi.	<i>Sustainability</i>
<i>Ketahanan oksigen, ketahanan bencana ga klean pikirkan? Memang SDM KONOHA</i>	Kekhawatiran atas hilangnya ketahanan oksigen dan bencana alam.	<i>Sustainability</i>
<i>Paling nanti diralat lagi wong kebijakan ngawur</i>	Ketidakpercayaan terhadap konsistensi kebijakan.	<i>Governance</i>
<i>Proyek balas budi dikerjakan oleh badut PSI</i>	Proyek dianggap memiliki motif politik.	<i>Governance</i>
<i>Emang triknya dibuka dulu, terus bikin proyek reforestasi lagi biar bisa diklaim carbon credit wak wkwk</i>	Reforestasi dianggap hanya untuk klaim <i>carbon credit</i> .	<i>Governance</i>
<i>Saya pesimis (bukan bermaksud merendahkan usaha pemerintah dlm hal swasembada pangan), sekarang yg utama adalah seberapa besar komitmen pemerintah memberantas korupsi itu sendiri yg</i>	Komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi sangat mempengaruhi keberhasilan swasembada pangan dan pengelolaan lingkungan.	<i>Governance</i>

<i>banyak dilakukan oleh oknum pejabat serta pengusaha.</i>		
<i>hati2 boss... jangan salah langkah ! hukuman dari alam tdk ada pengumuman, tdk kenal kompromi di sidang atau masa reses. kalau sudah banjir bandang dan kekeringan di mana2, siapa mau tanggung jawab ? ada kaitannya dgn kedatangan ribuan ekskavator seharga 4 T beberapa bulan lalu ?</i>	Peringatan terhadap dampak bencana alam akibat kesalahan pengelolaan lingkungan dan hutan.	<i>Sustainability</i>
<i>Semoga sebagian besar jadi sawit. . gak cuma produktif tp jg bisa menjaga kelestarian alam</i>	Harapan agar perkebunan sawit dapat produktif dan menjaga kelestarian alam.	<i>Sustainability</i>
<i>mentri kehutanan yang mengubah hutan jadi perkebunan otaknya dimana sih pejabat² skrg</i>	Kritik terhadap kebijakan yang mengubah hutan menjadi perkebunan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan.	<i>Governance</i>
<i>Pas hujan banjir dan longsor</i>	Menyoroti dampak bencana alam yang terkait dengan kerusakan hutan.	<i>Sustainability</i>
<i>Bakal ada penggundulan hutan lagi = merusak hutan= resiko banjir, tanah longsor ☐</i>	Prediksi penggundulan hutan akan meningkatkan risiko bencana alam.	<i>Sustainability</i>
<i>Siap banjir & longsor, komandan..</i>	Menyebutkan kesiapan menghadapi bencana alam akibat deforetasi.	<i>Sustainability</i>
<i>Gw sumpahin alam kubur nanti di gebukin Orangutan</i>	Kemarahan terhadap deforetasi dan dampaknya terhadap satwa.	<i>Sustainability</i>
<i>Hutan 20 juta Ha di jadikan lahan sawit, 20 Juta Ha hutan itu ratusan juga kayu akan hilang...</i>	Kritik terhadap konversi hutan menjadi perkebunan sawit yang merusak lingkungan.	<i>Sustainability</i>
<i>keren sih.. program yg bagus.. cuma klo dikelola oleh mantan @psi_id .. seperti nya saya pesimis dengan hasil kerjanya</i>	Pesimisme terhadap keberhasilan program jika dikelola oleh pihak yang tidak kompeten.	<i>Governance</i>
<i>Kalian rakyat masih percaya?</i>	Ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah dan pengelolaan lingkungan.	<i>Governance</i>
<i>Cuan cuan cuannnn</i>	Menunjukkan fokus pada keuntungan ekonomi, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan.	<i>Governance</i>

MUSYTARI

<i>Kalian mau sulapan lagi, tanam singkong tumbuh jagung?</i>	Skeptisisme terhadap kebijakan yang dianggap tidak realistis dan tidak mengarah pada keberlanjutan.	<i>Governance</i>
<i>Mundur aja jadi menteri kehutanan bro @rajaantoni berarti kedepan udah ga ada lagi hutan yg perlu dijaga</i>	Kritik terhadap kebijakan Menteri Kehutanan yang tidak memprioritaskan pelestarian hutan.	<i>Governance</i>

Setiap komentar telah diklasifikasikan ke dalam faktor utama, yaitu *sustainability* (keberlanjutan) dan *governance* (tata kelola), untuk mengetahui faktor terbesar dari opini publik. Opini publik terhadap isu deforestasi mengindikasikan adanya kekhawatiran yang substansial terkait aspek keberlanjutan (*sustainability*) dan tata kelola (*governance*) dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah untuk ketahanan pangan dan energi melalui deforestasi. Komentar-komentar warganet pada postingan instagram @bloombergtechnoz yang dianalisis mengungkapkan kritik tajam terhadap eksploitasi sumber daya alam yang dinilai tidak berorientasi pada prinsip keberlanjutan, minimnya perhatian terhadap dampak ekologis jangka panjang, serta kebijakan yang kerap dianggap inkonsisten atau bahkan sarat dengan kepentingan politik. Sehingga diperlukan penguatan praktik tata kelola lingkungan yang transparan dan akuntabel, serta pentingnya perancangan proyek pembangunan yang selaras dengan paradigma keberlanjutan demi melindungi kelestarian ekosistem hutan Indonesia untuk generasi mendatang.



Hutan Indonesia merupakan salah satu penyerap karbon terbesar di dunia. Penurunan tutupan hutan akibat deforestasi memberikan dampak langsung terhadap pemanasan global, kehilangan keanekaragaman hayati, dan kerusakan ekosistem. Konversi 20 juta hektare lahan hutan, meskipun untuk tujuan ketahanan pangan dan energi, dapat memperburuk masalah lingkungan jangka panjang jika tidak disertai dengan pendekatan berkelanjutan. Penelitian dari Wahyuni dan Suranto (2021) menggarisbawahi bahwa deforestasi di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap pemanasan global. Penurunan luas hutan akibat perubahan lahan untuk pertanian, infrastruktur, energi, dan perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu penyebab utama peningkatan emisi karbon. Sebagai "paru-paru dunia," hilangnya hutan di Indonesia tidak hanya memengaruhi keseimbangan ekosistem lokal tetapi juga memberikan dampak global terhadap iklim dan biodiversitas akibat kebijakan deforestasi ini. Menurut Raihan *et al.*, (2024) kebijakan deforestasi sering kali gagal menyeimbangkan antara keberlanjutan ekologis dan kebutuhan pembangunan ekonomi, disatu sisi dapat memberikan manfaat ekonomi tetapi rentan terhadap risiko kerusakan lahan dan emisi karbon yang meningkat. Di sisi lain, pembangunan berbasis keberlanjutan menekankan pentingnya pengelolaan hutan yang memperhatikan prinsip ekologis, sosial, dan ekonomi secara terpadu, sehingga diperlukan tata kelola yang baik.

Kritik publik terhadap tata kelola kebijakan deforestasi sering kali berfokus pada minimnya transparansi, inkonsistensi kebijakan, dan motif politik yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan lingkungan. Hegger *et al.* (2020) menyatakan bahwa tata kelola yang efektif memerlukan kerjasama lintas sektor yang melibatkan negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mencapai konsensus yang berorientasi pada keberlanjutan. Penelitian Mutolib *et al.*, (2019) mengidentifikasi bahwa laju deforestasi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum, pembalakan liar, dan konflik tenurial. Faktor-faktor ini berkontribusi pada pengelolaan sumber daya yang tidak efisien dan

eksploitasi berlebihan, yang mencerminkan adanya kegagalan tata kelola (*governance failure*) (Gultom & Mumbunan, 2023).

3.2. Analisis Ekonomi Lingkungan

Konversi 20 juta hektar hutan di Indonesia untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan air jika dianalisis dalam perspektif ekonomi lingkungan, bahwa hutan tidak hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga sebagai modal alami (*natural capital*) yang memiliki nilai intrinsik dan instrumental. Modal alami ini menyediakan layanan ekosistem kritis, termasuk penyimpanan karbon, pengendalian siklus hidrologi, serta habitat bagi keanekaragaman hayati yang penting untuk keseimbangan ekologis global (Mayasari *et al.*, 2024). Perspektif ekonomi keberlanjutan menekankan pentingnya memelihara fungsi ekosistem hutan untuk mendukung kesejahteraan antargenerasi. Menurut prinsip *sustainability*, sumber daya alam seperti hutan tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh modal buatan manusia, karena kehilangan hutan tropis akan menghasilkan dampak ireversibel terhadap ekosistem global (Mulyadi *et al.*, 2015). Pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan energi harus dilakukan dengan mempertimbangkan biaya eksternalitas negatif yang muncul, seperti emisi karbon, degradasi tanah, dan kehilangan keanekaragaman hayati.

Komentar-komentar seperti "*Pas hujan banjir dan longsor*" dan "*Ketahanan oksigen, ketahanan bencana ga klean pikirkan?*" secara gamblang mengungkap kepedulian publik terhadap eksternalitas negatif deforestasi. Hilangnya jasa ekosistem vital seperti regulasi hidrologis, pencegahan erosi, dan sekuestrasi karbon menimbulkan biaya sosial yang signifikan, sebagaimana dijelaskan oleh Baumol & Oates (1988) dalam Rahma *et al.*, (2020) bahwa kegagalan pasar dalam menginternalisasi biaya-biaya tersebut menyebabkan deforestasi tampak ekonomis bagi pelaku usaha, sementara masyarakat menanggung konsekuensi negatifnya.

Hutan, sebagai sumber daya milik bersama (*common pool resources*), menurut Forest Digest (2023) juga rentan terhadap overeksploitasi akibat tragedi kepemilikan bersama (*tragedy of the commons*), sebuah konsep yang dipopulerkan oleh Hardin (1968). Komentar "Yg udah2 sih cuma dikeruk isinya dan ditinggal / asal tanam" merefleksikan kekhawatiran publik akan pola eksploitasi sumber daya alam yang bersifat *unsustainable*. Tantangannya, menurut Ostrom (1990) dalam Albareda & Sison (2020) adalah merancang mekanisme kolektif yang efektif untuk mengelola sumber daya milik bersama secara berkelanjutan.

Deforestasi melanggar prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjunjung tinggi integrasi antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Komentar sinis "Global warming who? Yang penting cuan" menunjukkan dominasi paradigma eksploitatif yang mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek dibandingkan kelestarian lingkungan. Diperlukan pergeseran paradigma menuju pendekatan ekonomi hijau (*green economy*) yang mengintegrasikan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan hutan secara holistik. Ekonomi sumber daya alam menurut Pearce & Turner (1990) dalam Nurfatriani (2006) menekankan pentingnya melakukan valuasi ekonomi total (*total economic value*) hutan, yang meliputi nilai guna langsung, nilai guna tidak langsung, nilai opsi, dan nilai eksistensi, sebagai landasan pengambilan keputusan yang bijaksana.

Komentar-komentar seperti "Dipikir2 mata kuliah AMDAL cuma buat dpt cuan dr bayar UKT" dan "Proyek balas budi dikerjakan oleh badut PSI" menyiratkan kekecewaan publik terhadap tata kelola lingkungan yang lemah dan rawan korupsi karena motif politik. Stiglitz (2002) dalam Nugroho *et al.*, (2019) menjelaskan bagaimana kegagalan institusi dan rendahnya akuntabilitas dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Transparansi, partisipasi publik, dan penegakan hukum yang tegas merupakan pilar-pilar penting dalam membangun tata kelola kehutanan yang baik dan memulihkan kepercayaan publik. Nur & Husen (2022) menekankan bahwa pentingnya *good governance* dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

MUSYTARI

Komentar "*Saya pesimis... sekarang yg utama adalah seberapa besar komitmen pemerintah memberantas korupsi...*" menunjukkan pemahaman publik akan peran korupsi dalam merusak tata kelola kehutanan. Sebagaimana dijelaskan oleh Tacconi & Williams (2020) yang mengutip dari Svensson (2005) dan Krueger (1974), bahwa korupsi mendistorsi alokasi sumber daya dan menciptakan insentif perilaku *rent-seeking* dan melemahkan penegakan hukum lingkungan. Hal ini berujung pada eksploitasi hutan yang berlebihan dan tidak berkelanjutan, menguntungkan segelintir elite dengan mengorbankan kepentingan publik dan kelestarian lingkungan.

Komentar "*hati2 boss... jangan salah langkah ! hukuman dari alam tdk ada pengumuman...*" mengungkapkan kesadaran akan konsekuensi ekologis deforestasi dan tanggung jawab pemerintah dalam mencegah bencana. Hal ini sesuai dengan pendapat Ansar (2024) yang mengutip dari Stern (2006) dan Giddens (2009), yang menyoroti peningkatan risiko bencana alam akibat perubahan iklim yang diperparah oleh deforestasi. Komentar tersebut juga mengandung pesan moral pengambil keputusan cenderung mengabaikan dampak jangka panjang demi keuntungan jangka pendek. Deforestasi merupakan contoh klasik yang mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak-hak generasi mendatang demi keuntungan ekonomi sesaat.

Komentar "*Semoga sebagian besar jadi sawit. . gak cuma produktif tp jg bisa menjaga kelestarian alam*" mengungkap dilema kompleks seputar perkebunan sawit. Di satu sisi, menurut Hidayat (2023), sawit merupakan komoditas strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, sejalan dengan konsep *comparative advantage* dari Ricardo (1817). Di sisi lain, ekspansi sawit seringkali berjalan seiring dengan deforestasi dan kerusakan lingkungan. Tantangannya adalah mengelola ekspansi sawit agar sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, memanfaatkan keunggulan komparatif tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Menurut Nikensari *et al.*, (2020), hipotesis *Environmental Kuznets Curve* dari Grossman & Krueger (1991) menawarkan secerah harapan

MUSYTARI

bahwa peningkatan pendapatan dan kesadaran lingkungan dapat mendorong transisi menuju pola produksi yang lebih berkelanjutan.

Komentar-komentar seperti "*mentri kehutanan yang mengubah hutan jadi perkebunan. otaknya dimana sih pejabat² skrg ?*" dan "*Kalian rakyat masih percaya?*" mencerminkan kekecewaan dan ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah di bidang kehutanan. Komentar tersebut menunjukkan kekecewaan dan ketidakpercayaan publik terhadap tata kelola kehutanan. Kegagalan institusi dan kurangnya akuntabilitas, sebagaimana dijelaskan oleh Rusnaedy & Khaerah (2021) yang mengutip dari Acemoglu & Robinson (2012), Stigler (1971), dan Dryzek (1997) bahwa dapat menyebabkan *regulatory capture* di mana kebijakan dibajak oleh kepentingan pribadi dan kelompok usaha yang merusak hutan. Penguatan demokrasi lingkungan dengan meningkatkan partisipasi publik dan transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi krusial untuk mencegah *regulatory capture* dan menjamin keadilan lingkungan (*environmental justice*).

Komentar-komentar seperti "*Pas hujan banjir dan longsor*", "*Bakal ada penggundulan hutan lagi = merusak hutan= resiko banjir, tanah longsor*", dan "*Gw sumpahin alam kubur nanti di gebukin Orangutan*" menunjukkan meningkatnya kesadaran ekologis di kalangan masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. komentar-komentar yang mengungkapkan kemarahan dan keprihatinan terhadap dampak deforestasi mencerminkan meningkatnya kesadaran ekologis di kalangan masyarakat. Sesuai dengan pendapat Kawengian (2019) yang mengutip dari Guha (1989), Bullard (1990), dan Leopold (1949) tentang pentingnya partisipasi publik dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, dimana kesadaran akan *environmental justice* dan etika lingkungan semakin mengakar di masyarakat, menuntut agar pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan bagi generasi kini dan mendatang.

Analisis ekonomi lingkungan dan keberlanjutan tersebut, rencana deforestasi harus diimbangi oleh analisis biaya-manfaat yang komprehensif, melibatkan para akademisi dan masyarakat dalam tata kelola yang transparan. Seperti yang ditegaskan oleh Daly dan Farley (2011) dalam Mahmud *et al.*, (2022), bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai jika pemerintah mampu menginternalisasi eksternalitas lingkungan ke dalam kebijakan. Tanpa langkah mitigasi dan komitmen keberlanjutan yang kuat, rencana tersebut berisiko mempercepat kerusakan ekosistem yang dampaknya akan dirasakan oleh generasi mendatang. Prinsip *steady-state economy* memprioritaskan konservasi sumber daya alam untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekosistem. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, seperti penebangan hutan secara masif, tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga mengurangi kapasitas regeneratif modal alami yang mendukung kehidupan manusia secara berkelanjutannya. Menurut Mulyadi *et al.*, (2023) yang mengutip dari Pearce dan Turner (1990) menjelaskan bahwa kebijakan berbasis eksploitasi jangka pendek sering kali mengabaikan *opportunity cost* terhadap hilangnya potensi layanan ekosistem hutan. Ketergantungan pada ekspansi lahan untuk produksi komoditas pangan dan energi, seperti padi gogo dan kelapa sawit harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap degradasi tanah dan kehilangan biodiversitas .

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang dinamika kritis dari opini publik terhadap kebijakan deforestasi di Indonesia, terutama strategi pemerintah untuk ketahanan pangan dan energi. Penelitian ini menggunakan pendekatan netnografi untuk menganalisis interaksi daring (*online*) di akun Instagram @bloombergtechnoz, dan penelitian ini mengungkap dua perhatian utama yang mendorong sentimen publik: *sustainability* (keberlanjutan) dan *governance* (tata kelola). Diskursus opini publik dari warganet secara dominan menyoroti kekhawatiran akan dampak lingkungan jangka panjang dari deforestasi, seperti hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan emisi karbon, dan degradasi ekosistem. Secara bersamaan, kritik juga diarahkan pada aspek tata kelola, seperti inkonsistensi kebijakan, dugaan motif politik, dan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pentingnya mengintegrasikan pertimbangan ekologis dan sosial ke dalam kerangka kebijakan untuk memastikan keselarasan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Analisis ekonomi-lingkungan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan deforestasi, meskipun bertujuan untuk ketahanan ekonomi nasional, namun berpotensi menimbulkan biaya ekologis yang signifikan. Sehingga dengan memandang hutan sebagai modal alami (*natural capital*) yang tak tergantikan, penelitian ini menekankan konsekuensi *irreversible* dari konversi lahan hutan yang luas menjadi lokasi produksi pangan dan energi tanpa pengamanan lingkungan yang ketat. Kekhawatiran publik tentang keadilan lingkungan (*environmental justice*) sejalan dengan perspektif teoretis yang menyerukan keseimbangan antara tujuan pembangunan dan pengelolaan ekologi. Penelitian ini menguatkan argumen bahwa

deforestasi yang tidak terkendali tidak hanya merongrong stabilitas lingkungan Indonesia tetapi juga komitmennya pada mitigasi perubahan iklim di tingkat global.

4.2 Saran

Sebagai respons terhadap hasil penelitian ini, penelitian ini merekomendasikan dan menyarankan agar pembuat kebijakan mengadopsi pendekatan holistik dalam pengelolaan penggunaan lahan, dengan mengutamakan integritas ekologis seiring dengan tujuan ekonomi. Mekanisme tata kelola yang transparan, melibatkan pengambilan keputusan partisipatif dan langkah akuntabilitas yang ketat, menjadi sangat penting. Selain itu, investasi dalam teknologi hijau dan praktik ekonomi berkelanjutan harus ditingkatkan untuk mengurangi dampak buruk dari deforestasi. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meredakan ketidakpuasan publik tetapi juga mendorong ketahanan lingkungan dan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan metodologis dengan mengintegrasikan data kuantitatif dari platform digital yang lebih luas untuk memvalidasi dan memperdalam wawasan. Penyelidikan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga dapat memberikan *framework* yang dapat diterapkan untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Refleksi pribadi atas penelitian ini menyoroti keterhubungan mendalam antara sistem lingkungan, sosial, dan ekonomi, sehingga menggarisbawahi urgensi untuk mengadopsi kebijakan yang secara adil menangani tantangan yang kompleks, dan perlunya penelitian lebih lanjut dengan metode penelitian dan analisis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. New York: Crown Business.
- 2) Albareda, L., & Sison, A. J. G. (2020). Commons organizing: Embedding common good and institutions for collective action. Insights from ethics and economics. *Journal of Business Ethics*, 166, 727-743.
- 3) Ansar, S. S. A., Rahmawati, A., & Arrahman, R. D. (2024). Peninjauan bencana alam akibat deforestasi hutan dan tantangan penegakkan hukum mengenai kebijakan penebangan hutan berskala besar di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1-11.
- 4) Anshari, M., & Permata, C. (2024). Deforestasi hutan lindung dalam proyek strategis nasional food estate perspektif maqashid syariah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(3), 2031-2047.
- 5) Armayani, R., Lubis, K. H., & Sari, N. (2022). Hubungan antara ekonomi dengan lingkungan hidup: Suatu kajian literatur. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1(2), 175-182.
- 6) Arshad, Z., Robaina, M., Shahbaz, M., & Veloso, A. B. (2020). The effects of deforestation and urbanization on sustainable growth in Asian countries. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(9), 10065-10075.
- 7) Ayu, K. P. (2021). Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah: Mekanisme politik di balik kerusakan ekologi. *Jurnal Sosiologi*, 4(2), 61-71.
- 8) Baumol, W. J., & Oates, W. E. (1988). *The theory of environmental policy* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- 9) Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. *Information, Communication & Society*, 15(5), 739-768.
- 10) Berlianty, T., & Meiliana, T. (2023). Potensi deforestasi di Pulau Kalimantan: Pro dan kontra migrasi. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 5(2), 279-290.

MUSYTARI

- 11) Bloombergtechnoz. (2025). Pemerintah berencana mengubah 20 juta hektare hutan di Indonesia.... Instagram. <https://www.instagram.com/p/DEWh6GMy5vE/>
- 12) Blumer, H. (1948). *Public opinion and the sociology of knowledge*. Social Forces, 26(3), 22-32.
- 13) Bullard, R. D. (1990). *Dumping in Dixie: Race, class, and environmental quality*. Boulder: Westview Press.
- 14) Crespi, I. (1997). *Public opinion, polls, and democracy*. Westview Press. Boulder, CO.
- 15) Curtis, P. G., Slay, C. M., Harris, N. L., Tyukavina, A., & Hansen, M. C. (2018). Classifying drivers of global forest loss. *Science*, 361(6407), 1108-1113
- 16) Dalla-Nora, E. L., de Aguiar, A. P. D., Lapola, D. M., & Woltjer, G. (2014). Why have land use change models for the Amazon failed to capture the amount of deforestation over the last decade? *Land Use Policy*, 39, 403-411.
- 17) Daly, H. E., & Farley, J. (2011). *Ecological economics: Principles and applications* (2nd ed.). Washington, DC: Island Press.
- 18) Danhas, Y., & Muchtar, B. (2021). *Ekonomi lingkungan*. Sleman: Deepublish.
- 19) Dewi, R. U. I., Zuhaiery, A., Sa'diyah, N. H., Rizqiya, T. F., & Nurpratiwi, H. (2023). Harmonisasi masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi deforestasi di selatan Tulungagung. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(2), 149-157.
- 20) Dryzek, J. S. (1997). *The politics of the Earth: Environmental discourses*. Oxford: Oxford University Press.
- 21) Fadhli, A., Yulianita, N., & Chaerowati, D. L. (2024). Netnografi budaya digital dari media sosial manual Brew Community. *PIKMA*, 7(1), 86-104.
- 22) Fauzi, A. (2006). *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- 23) Forest Digest. (2023). Apakah hutan itu barang publik? *Forest Digest*. <https://www.forestdigest.com/detail/2468/hutan-barang-publik>

- 24) Gamatara, M. P. J., & Kusumawardani, D. (2024). Pengaruh deforestasi terhadap emisi CO2 pada negara beriklim tropis di Benua Asia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 8(2), 1239-1256.
- 25) Giddens, A. (2009). *The politics of climate change*. Cambridge: Polity Press.
- 26) Global Forest Watch (GFW). (2024). *Indonesia primary forest loss 2002-2023*. Retrieved from <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/?lang=id>
- 27) Glynn, C. J., Herbst, S., O'Keefe, G. J., & Shapiro, R. Y. (1999). *Public opinion* (2nd ed.). Westview Press: Boulder, CO.
- 28) Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1991). Environmental impacts of a North American free trade agreement. *The National Bureau of Economic Research*, Working Paper No. 3914.
- 29) Guha, R. (1989). *The unquiet woods: Ecological change and peasant resistance in the Himalaya*. Berkeley: University of California Press.
- 30) Gultom, J. E. I., & Mumbunan, M. T. (2023). Determinan deforestasi di Indonesia. *Tri Panji - Liberal Arts Journal*, 2(1), 48-61.
- 31) Hadiyan, Y., Yuliah, Y., & Pambudi, H. (2017). Memahami dan membangun pendekatan penyelesaian deforestasi dan degradasi hutan di Region Sumatera dan Kalimantan. *Proceeding Biology Education Conference*, 14(1), 166-169.
- 32) Handalani, R. T. (2019). Determinan deforestasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara periode 2008-2015. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 15(1), 1-19.
- 33) Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. *Science*, 162(3859), 1243-1248.
- 34) Hegger, D. L. T., Runhaar, H. A. C., Van Laerhoven, F., & Driessen, P. P. J. (2020). Towards explanations for stability and change in modes of environmental governance: A systematic approach with illustrations from the Netherlands. *Earth System Governance*, 3, 100048.
- 35) Hidayat, A. (2023). *Analisis konsentrasi, efisiensi teknis dan daya saing industri minyak kelapa sawit mentah/crude palm oil (Isic 10432) Indonesia* (Disertasi,

- Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya).
Universitas Sriwijaya.
- 36) Hine, C. (2001). *Virtual ethnography*. London: Sage Publications Ltd.
- 37) Hutabarat, G. F. I. (2022). Kajian green politic theory dalam upaya menangani deforestasi Papua terkait aktivitas ekspansi. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, 7(2), 59-76.
- 38) Karsiyati, ., & Setiaji, C. A. (2023). Tragedy of the commons di kawasan geopark: Faktor penyebab dan solusi. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 160-170.
- 39) Kawengian, G. P. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. *Lex Et Societatis*, VII(5), 55-62.
- 40) Kompas. (2025). Menhut Raja Juli Antoni ungkap rencana 20 juta hektar jadi lahan pangan dan energi. *Kompas TV*.
<https://www.kompas.tv/nasional/564469/menhut-raja-juli-antoni-ungkap-rencana-20-juta-hektar-jadi-lahan-pangan-dan-energi>
- 41) Kozinets, R. V. (2010). *Netnography: Doing ethnographic research online*. Singapore: Sage.
- 42) Krueger, A. O. (1974). *The political economy of the rent-seeking society*. *American Economic Review*, 64(3), 291-303.
- 43) Leopold, A. (1949). *A sand county almanac: With other essays on conservation from round river*. Oxford: Oxford University Press.
- 44) Lippmann, W. (1922). *Public opinion*. Harcourt Brace.
- 45) Machmud, M., Fikri, A., Tamara, D., Afandi, F. A., Tarigan, N. P., Heriyati, P., & Santosa, W. (2022). *Keberlanjutan dalam perspektif bisnis dan inklusifitas*. Surabaya: Scopindo Media Utama.
- 46) Margono, B. A., Potapov, P. V., Turubanova, S., Stolle, F., & Hansen, M. C. (2014). Primary forest cover loss in Indonesia over 2000-2012. *Nature Climate Change*, 4(June), 1-6.

- 47) Markham, A. (2005). *The methods, politics, and ethics of representation in online ethnography*. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The Sage handbook of qualitative research* (3rd ed., pp. 793-820). Sage Publications.
- 48) Mayasari, Z. M., Fadilah, ., Reflis, ., Utama, S. P., & Ramdhon, M. (2024). Valuasi ekonomi nilai jasa hutan: Sebuah literature review. *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi*, 3(1), 109-117.
- 49) McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). SAGE Publications.
- 50) Mukti, A. (2024). Analisis deforestasi dan perubahan tutupan lahan di Kabupaten Bogor: Implikasi bagi konservasi hutan dan pengelolaan sumber daya alam. *Peatland Agriculture and Climate Change Journal*, 1(1), 24-34.
- 51) Mulyadi, M., Lestari, T. R. P., Alawiyah, F., Wahyuni, D., Astri, H., Martiany, D., Rivani, E., & Qodriyatun, S. N. (2015). *Pembangunan berkelanjutan: Dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI.
- 52) Muntu, S. A. J., Tangkudung, J. P. M., & Lotulung, L. J. H. (2021). Studi netnografi pada media sosial Instagram. *Acta Diurna Komunikasi*, 3(4).
- 53) Mutolib, A., Yonariza, & Rahmat, A. (2019). Faktor penarik dan pendorong deforestasi hutan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat. *Journal of Tropical Upland Resources*, 1(1), 161-170.
- 54) Mutolib, A., Yonariza, & Rahmat, A. (2019). Faktor penarik dan pendorong deforestasi hutan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat. *Journal of Tropical Upland Resources*, 1(1), 161-170.
- 55) Mutolib, A., Yonariza, Mahdi, & Ismono, H. (2017). Forest ownership conflict between a local community and the state: A case study in Dharmasraya, Indonesia. *Journal of Tropical Forest Science*, 29(2), 163-171.
- 56) Nikensari, S. I., Destilawati, S., & Nurjanah, S. (2019). Studi environmental Kuznets curve di Asia: Sebelum dan setelah millennium development goals. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 27(2), 11-25.

- 57) Ningrum, D. A., Desfandi, M., & Ruliani, R. (2022). Identifikasi perubahan lahan hutan menjadi lahan pertanian di Desa Paya Dedep Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 7(2), 168-179.
- 58) Noelle-Neumann, E. (1984). *The spiral of silence: Public opinion, our social skin*. University of Chicago Press.
- 59) Nono, E. A. L. (2024). Kajian peranan ekonomi lingkungan dalam pembangunan nasional. *Jurnal Ilmu Pertanian Tropis (JIPT)*, 1(1), 24-28.
- 60) Nugroho, S. S., Erwin, Y., & Rohayu, R. H. (2019). *Hukum sumber daya alam: Perspektif keadilan inter-antar generasi*. Kartosuro: Penerbit Taujih.
- 61) Nur, M. S., & Husen, A. (2022). Good environmental governance dan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. *JGG- Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 11(1), 35-49.
- 62) Nurfatriani, F. (2006). Konsep nilai ekonomi total dan metode penilaian sumberdaya hutan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 3(1), 1-16.
- 63) Nurhaliza, W. O. S. (2024). Studi netnografi penggunaan media sosial untuk bisnis pada akun Instagram @Jilbrave.Official. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO*, 9(2), 350-363.
- 64) Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- 65) Pasai, M. (2020). Dampak kebakaran hutan dan penegakan hukum. *Jurnal Pahlawan*, 3(1), 36-46.
- 66) Pearce, D. W., & Turner, R. K. (1990). *Economics of natural resources and the environment*. New York: Harvester Wheatsheaf.
- 67) Pearce, D. W., & Turner, R. K. (1990). *Economics of natural resources and the environment*. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
- 68) Price, V. (1992). Public opinion, elections, and democracy. In *Annual review of political science* (Vol. 5, pp. 123-150). Annual Reviews.

- 69) Purwanto, E., & Ihalauw, J. J. O. (2017). Bisikan dari balik layar: Netnografi strategi bisnis berorientasi pasar. *Journal of Business & Applied Management*, 9(2), 220-233.
- 70) Rahma, N. E., Rositah, E., Pramono, D. A., Widyasasi, D., & Fariyanti, F. (2020). Valuasi jasa ekosistem hutan tropis di Kalimantan Timur dengan metode benefit transfer. *Buletin LOUPE*, 16(1), 27-34.
- 71) Rahman, A., & Zahra, S. (2021). Analisis penyebab, dampak, serta upaya pengurangan deforestasi hutan di Indonesia. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(2), 149-157.
- 72) Raihan, Y. D., K.D, A. K., & M., H. B. (2024). Kebijakan pemerintah terkait upaya implementasi kajian Amdal guna mewujudkan IKN berdasar sustainable development. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(8), 284-299
- 73) Ramadhany, N. (2023). Laju deforestasi hutan akibat aktivitas pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. *Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan*, 7(1), 10-19.
- 74) Ricardo, D. (1817). *On the principles of political economy and taxation*. London: John Murray.
- 75) Rinaldi, A. R., Mutiarin, D., & Damanik, J. (2021). Analisis netnografi sentimen pengguna Twitter terhadap pembukaan kembali pariwisata di tengah pandemi Covid-19. *Pariwisata Budaya*, 28-36.
- 76) Rusnaedy, Z., & Khaerah, N. (2021). Mengapa negara gagal - Awal mula kekuasaan, kemakmuran dan kemiskinan. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 9(2), 412-419.
- 77) Sabrina, G. R., & Vera, N. (2023). Komentar positif netizen terhadap film 'Like & Share' (studi netnografi akun Instagram @Filmlikeandsahre). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 7008-7018.
- 78) Sahid, H. H. (2023). Opini publik tragedi Kanjuruhan: Studi netnografi pada kolom komentar video YouTube tragedi Kanjuruhan. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO*, 8(2), 140-158.

- 79) Seydewitz, T., Pradhan, P., Landholm, D. M., & Kropp, J. P. (2023). Deforestation drivers across the tropics and their impacts on carbon stocks and ecosystem services. *Anthropocene Science*, 2, 81-92.
- 80) Solehuwey, E., Mardiatmoko, G., & Boreel, A. (2024). Analisis deforestasi dan degradasi hutan di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 8(1), 37-50.
- 81) Stern, N. (2006). *The economics of climate change: The Stern review*. Cambridge: Cambridge University Press.
- 82) Stigler, G. J. (1971). *The theory of economic regulation*. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3-21.
- 83) Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. New York: W.W. Norton & Company.
- 84) Sulistyowati, R. A. (2024). Studi netnografi respon warganet mengenai toxic relationship pada video YouTube penyintas #BukanSayang Namanya. *Jurnal Interaksi*, 8(2), 355-373.
- 85) Sumarno, Utari, P., & Rahmanto, A. (2021). Studi netnografi post-truth dalam percakapan politik pemilihan presiden 2019 di Facebook. *Jurnal PIKOM*, 22(2), 161-176.
- 86) Sunstein, C. R. (2009). *Going to extremes: How like-minded groups are spreading the political divide and threatening democracy*. Oxford University Press.
- 87) Svensson, J. (2005). *Eight questions about corruption*. *Journal of Economic Perspectives*, 19(3), 19-42.
- 88) Tacconi, L., & Williams, D. A. (2020). Corruption and anti-corruption in environmental and resource management. *Annual Review of Environment and Resources*, 45, 305-329.
- 89) Tempo. (2025). Pro-kontra pernyataan Prabowo soal deforestasi untuk perluasan lahan sawit: Dari APKASINDO hingga Greenpeace. *Tempo*.

<https://www.tempo.co/ekonomi/pro-kontra-pernyataan-prabowo-soal-deforestasi-untuk-perluas-lahan-sawit-dari-apkasindo-hingga-greenpeace-1190443>

- 90) Tempo. (2025). Anggota Komisi IV DPR sindir Menteri Kehutanan Raja Juli soal kelestarian hutan Indonesia. *Tempo*.
<https://www.tempo.co/politik/anggota-komisi-iv-dpr-sindir-menteri-kehutanan-raja-juli-soal-kelestarian-hutan-indonesia-1189690>
- 91) VoA Indonesia. (2025). Aktivis lingkungan: Pernyataan Prabowo soal sawit dan deforestasi membahayakan. *VoA Indonesia*.
<https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-lingkungan-pernyataan-prabowo-soal-sawit-dan-deforestasi-membahayakan/7922112.html>
- 92) Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021). Dampak deforestasi hutan skala besar terhadap pemanasan global di Indonesia. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 148-162.
- 93) Wulandari, C., Kaskoyo, H., Febryano, I. G., Safe'i, R., Bakri, S., & Yuwono, S. B. (2016). *Pengelolaan hutan berkelanjutan*. Yogyakarta: Plantaxia.
- 94) Yenny, & Astuti, S. W. (2019). Body shaming di dunia maya: Studi netnografi pada akun YouTube Rahmawati Kekeyi Putri Cantika. *PROMEDIA*, 5(1), 166- 188.

LAMPIRAN



<https://www.instagram.com/p/DEWh6GM5vE/>